

## MEMBEDAH PELUANG KERJA LULUSAN PLS DALAM RELEVANSI ANTARA AKADEMIK DAN DUNIA KERJA

Habib Prastyo

*Abstract : The breadth of scope outside the school education area requires the availability of PLS to develop themselves by providing usefulness in the world of work both individually and with the community and working with a group of network development initiatives, including stakeholders, are indispensable in the overall effort to fulfill the ever-changing needs of society and takes place in community has a variety of characteristics, then the contents of the program always leads to flexibility.*

*Keyword: labor, Out of School Education, entrepreneurship.*

### PENDAHULUAN

Revolusi teknologi komunikasi dan informasi telah berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Perubahan-perubahan ini telah memicu kesadaran baru dalam diri umat manusia, terutama yang terkait dengan potensi diri dan kekuatan kerjasama kelompok untuk berkembang dan kekuatan kerjasama secara kelompok. Dampak lain adalah adanya kebutuhan untuk mengubah tata nilai dan tata hubungan individu dan antara kelompok yang selama ini mengatur kehidupan ke arah hubungan yang lebih akomodatif dan lebih demokratis.

Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya melalui pendidikan formal saja, akan tetapi peran pendidikan non formal memiliki peran dan fungsi yang strategis sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 yang menyatakan pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dan bagi penyelenggara setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (PP No. 19 Tahun 2005).

Kebijakan otonomi dan desentralisasi yang diluncurkan tahun 2000 ikut mewarnai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pendidikan di Indonesia, termasuk dalam pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya yang terkait dengan optimalisasi potensi dan budaya daerah di dalam pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan masyarakat, yang diperkuat dengan gerakan demokratisasi dan globalisasi pendidikan, tuntutan akuntabilitas publik terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan

tenaga kependidikan semakin kuat. Hal ini dimungkinkan karena makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas pendidikan, yang diperkuat dengan semakin ketatnya kompetisi lulusan setiap jenjang pendidikan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu strategi pendidikan nasional yaitu relevansi pendidikan dengan upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan pembangunan dalam hal ini dunia kerja. Keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan dan pembangunan semakin dirasakan karena beberapa kecenderungan, antara lain:

1. kecenderungan umum dalam dunia pendidikan menunjukkan adanya perubahan cara berpikir yang memandang bahwa pendidikan semestinya menyiapkan peserta didik secara utuh, menyangkut pengetahuan, sikap, kemauan, dan keterampilannya yang fungsional bagi kehidupannya sebagai pribadi, warga negara dan warga masyarakat, serta usahanya mencari nafkah. Dengan demikian, pandangan mengenai pendidikan yang cenderung mengunggulkan kemampuan akademik saja tidaklah cukup tanpa harus melihat relevansinya dengan dunia luar yang senantiasa berubah: dunia kerja, dunia pendidikan yang modern, masyarakat modern, dan globalisasi, dan sebagainya jika kita tidak ingin tertinggal.
2. Meningkatnya tuntutan dunia kerja terhadap pendidikan yang sejalan dengan tuntutan pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
3. Restrukturisasi dan persyaratan dunia kerja yang semakin kompetitif dan mengandalkan keahlian dalam bidang tertentu, tanpa mengabaikan wawasan dan pengetahuan secara interdisipliner.
4. Populernya konsep pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang mendapatkan tekanan kuat. Merupakan investasi untuk masa depan. Dalam kerangka SDM ini, keberhasilan pendidikan ditakar dengan menggunakan parameter-parameter yang terukur dan operasional seperti tingkat balikan (*rate of return*), indeks efisiensi dan efektivitas, dan lain-lain.

Untuk memberi layanan PNF tersebut diperlukan dukungan pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam hal ini Pamong Belajar dan Penilik yang berstatus sebagai pegawai negeri (PNS). Disamping itu pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan PNS adalah Tutor, Fasilitator Desa Binaan Intensif, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), Nara Sumber Teknis, Pamong PAUD.

## **PENGERTIAN PLS**

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Pendidikan Nonformal (PNF) memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan persekolahan atau Pendidikan Formal yaitu salah satunya adalah pendidikan persekolahan memiliki keterbatasan waktu, ruang, fleksibilitas dan isi, maka PLS dirancang dari kebutuhan masyarakat dan berlangsung ditengah-tengah masyarakat tanpa membatasi usia dan jenis kelamin. Karena berangkat dari kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dan berlangsung dalam masyarakat yang memiliki keragaman karakteristik, maka isi programnya selalu mengarah pada fleksibilitas. Artinya isi program disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat yang memerlukannya.

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Pendidikan Nonformal (PNF) berfungsi sebagai pelengkap (*complement*), pengganti (*substitute*) dan penambah (*supplement*) pendidikan sekolah (UU No.20/2003 tentang Sisdiknas).

Program PNF diarahkan untuk memberi layanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah (buta aksara) dan warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan melalui satuan-satuan PNF.

Berbagai program PNF yang dikembangkan terdiri :

1. Pendidikan Keaksaraan diarahkan pada pendidikan keaksaraan fungsional (penurunan buta aksara usia 15 tahun keatas pada tahun 2014).
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) yaitu agar anak dapat berkembang sesuai tingkat usianya dan berdampak pada kesiapan memasuki sekolah.
3. Peningkatan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat.
4. Pendidikan kecakapan hidup yang dapat diintegrasikan dalam berbagai program PNF sebagai upaya kemampuan untuk hidup mandiri.
5. Peningkatan Budaya Baca Masyarakat sebagai upaya memelihara keaksaraan peserta didik melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
6. Memperkuat Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Daerah sebagai tempat pengembangan model program PNF.

I)

II)

## **HUBUNGAN KEBUTUHAN DENGAN DUNIA KERJA**

Tenaga PLS yang profesional memiliki ciri-ciri: dapat mendidik, membentuk, mengelola dan mengembangkan satuan pendidikan, mengenal kebutuhan belajar calon peserta didik, dapat mempertemukan peserta didik dengan sumber belajar, berkepribadian, dan memiliki komitmen dan perhatian terhadap perkembangan peserta didik. Karena kebutuhan belajar calon peserta didik dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, tenaga PLS dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Untuk itu tenaga PLS perlu memiliki kemampuan untuk menggali informasi dari berbagai sumber termasuk dari sumber elektronik dan melakukan kajian atau penelitian untuk menunjang pembelajaran yang mendidik.

Dunia kerja bagi lulusan PLS bukan diartikan mencari pekerjaan tetapi “merebut peluang kerja” dan “menciptakan dunia kerja”. Merebut peluang kerja dengan bekal cukup, dan mampu bersaing. Persoalannya adalah sudahkah lulusan PLS dibekali dengan kemampuan yang cukup untuk merebut peluang kerja: amunisi, strategi berkompetisi, kemandirian, *interpreneurship*, daya juang, dan motivasi berprestasi (*achievement motivation*).

Kita harus introspeksi dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat menurut Siswono adalah:

1. Sistem pendidikan kita belum cukup mengajarkan sikap disiplin, *achievement motivation*, dan lemahnya terhadap pelaku penyimpangan, narkoba, dsb.
2. Pendidikan kita mengarah pada murid mencari ijazah, untuk status bukan untuk prestasi riil, sehingga muncul ijazah aspal.
3. Kita kurang membangun *enterpreneurship* atau sikap kemandirian.
4. Kurang mengajarkan cara pandang yang produktif.

Selain itu yang cukup mendasar adalah lembaga pendidikan telah mengarah “bisnis pendidikan”.

Dalam tujuan pendidikan nasional terkandung tiga dimensi tujuan, yaitu: (a) perkembangan kepribadian peserta didik, (b) Pembinaan peserta didik agar menjadi warga masyarakat dan negara yang baik, (c) penyiapan peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kemampuan, dan keterampilan yang fungsional bagi kehidupan pribadinya, masyarakatnya, dan bangsanya. Dua dimensi tujuan yang disebut pertama merupakan tujuan intrinsik dari pendidikan, sedangkan tujuan yang disebut terakhir menunjukkan pada dimensi tujuan instrumental, yaitu pendidikan sebagai wahana atau instrumen bagi perbaikan taraf hidup dan peningkatan pembangunan.

Tujuan pendidikan nasional menekankan keutuhan dan keserasian, artinya pembinaan peserta

didik tidak bersifat parsial hanya untuk dimensi tertentu sesuai dengan prinsip “manusia Indonesia seutuhnya”. Dalam praktek kependidikan yang berkaitan dengan pembangunan, upaya mempertahankan keutuhan ini tidak selalu mudah. Pendidikan yang sejati dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan secara seimbang dan selaras.

Bobot perkembangan kepribadian peserta didik semestinya sesuai dengan tuntutan yang berkembang dalam lingkungan sosial dan bangsa. Begitu juga dengan pembinaan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik seharusnya sesuai dengan semangat zaman dan perkembangan dalam lingkungan strategi sebagai suatu bangsa dan bagian dari masyarakat regional dan bahkan internasional. Untuk itu, dimensi instrik dari tujuan pendidikan semestinya selalu disegarkan agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah.

Dari perspektif pendidikan sebagai wahana untuk menunjang pembangunan dalam berbagai sektor dan sub-sektor, ada beberapa fakta yang memperkuat perlunya usaha ke arah lebih menciptakan keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan, khususnya dengan dunia kerja/usaha/industri.

Pendidikan seyogyanya terkait dan serasi dengan kebutuhan (needs, demands). Kebutuhan dalam pembangunan sangat luas, bersifat multidimensional, dan multisektoral, mulai kebutuhan peserta didik sendiri, kebutuhan keluarganya, kebutuhan untuk pembinaan warga masyarakat dan warga negara yang baik, dan kebutuhan dunia kerja. Dari perspektif ini, proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok (“match”) dengan kebutuhan tersebut, baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi, maupun dari segi waktunya.

Keterkaitan dan keserasian pendidikan dan pembangunan perlu mendapatkan tekanan karena dalam kenyataannya, pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan-sesuai dengan fungsi dan ujuan institusionalnya yang termaktub dalam Sisdiknas terdapat dimensi tujuan yang mengandung pesan perlunya keterkaitan dan kesesuaian tersebut.

Dalam melakukan tugasnya, tenaga PLS berfungsi sebagai pendidik (dalam wujud fasilitator/pendamping, instruktur/tutor/widiaiswara, dan pamong belajar), sebagai pengelola dan pengembang program pendidikan dalam satuan pendidikan luar sekolah. Tenaga PLS harus mampu mengakomodasikan dinamika perubahan yang terjadi dalam lingkup nasional, regional dan global, dengan tetap berpegang pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tenaga PLS yang mampu mengemban tugas tersebut adalah tenaga yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Pada tataran operasional tenaga PLS dapat mengelola program pembelajaran, memfasilitasi proses pembelajaran dan memperhatikan perkembangan peserta didik dalam berbagai dimensinya, yang mengarah pada kemilikan dan perkembangan inteligensi, kebutuhan belajar, keterampilan belajar, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, dan kemandirian sosial, membentuk dan mengelola satuan pendidikan luar sekolah, serta mengembangkan program pendidikan sesuai dengan satuan pendidikannya.

Pada jenjang Pendidikan Tinggi, kedua dimensi tujuan itu diwakili dalam istilah kemampuan “akademik” dan “profesional”. Kemampuan akademik menekankan kemampuan penguasaan dan pengembangan ilmu, dan kemampuan profesional menekankan kemampuan dan keterampilan kerja. Pada jenjang ini, Pendidikan Tinggi dituntut untuk lebih mengarahkan peserta didik untuk penguasaan IPTEK, dan secara kelembagaan, riset dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan perlu mendapatkan perhatian.

## I) STRATEGI IMPLEMENTASI

Membangun keterkaitan dan keserasian antara pendidikan dan dunia kerja/dunia usaha/industri,

diperlukan kerjasama antara kedua pihak. Pendidikan dan dunia kerja serta masyarakat perlu melakukan dialog untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, dan menentukan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan itu.

Untuk itu, dunia dunia kerja/usaha/industri dituntut untuk lebih membuka diri terhadap pendidikan, baik dalam arti sikap maupun tindakan nyata termasuk menjadi tempat magang dan praktek lapangan bagi para peserta didik. Di pihak lain, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan konsolidasi mulai tahap perencanaan sampai implementasi dan evaluasinya sehingga kebijakan ini mempunyai arti yang maksimal, sesuai dengan tujuannya.

Pada tingkat perguruan tinggi: (1) meningkatkan dialog dan kerja sama dengan dunia kerja, dunia usaha, dan industri dalam bidang pendidikan dan penelitian; (2) meningkatkan kegiatan praktek lapangan, kuliah kerja, dan magang; dan (3) memperkuat sarana, prasarana, dan kualitas tenaga baik untuk peningkatan kualitas akademik/profesionalisme.

## **PENUTUP**

Pengembangan jaringan kerja dengan kelompok pemrakarsa, termasuk stakeholders, sangat diperlukan dalam keseluruhan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dan berlangsung dalam masyarakat yang memiliki keragaman karakteristik, maka isi programnya selalu mengarah pada fleksibilitas. Maka diharapkan lulusan pendidikan Luar Sekolah dirancang dari kondisi kebutuhan masyarakat dan berlangsung ditengah-tengah masyarakat tanpa membatasi usia dan jenis kelamin. Artinya isi program disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan luar sekolah harus direncanakan sebaik mungkin sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung tanpa mempengaruhi kegiatan masyarakat. Sehingga konsep dunia kerja bagi lulusan PLS bukan diartikan mencari pekerjaan tetapi bagaimana mendapatkan peluang kerja dan menciptakan dunia kerja baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Goldberg Alvin A & Larson Carl E. (1985). *Komunikasi Kelompok, Proses-proses Diskusi dan Penerapannya* (Koesdarini Soemiati dan Gary R. Jusuf, Penerjemah). Jakarta: UI Press
- Johnson, David W., dan Frank P. Johnson. (1990). *Joining Together : Group Theory and Group Skills*, Englewood Cliffs, New York : Prentice Hall Inc.
- Joyomartono, Mulyono. (1991). *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rahman, Nurdin. 1989. *Instruksional Material Perencanaan Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sahabuddin. 1985. *Pendidikan Nonformal, Suatu Pengantar Ke dalam Pemahaman Konsep dan Prinsip-Prinsip Pengembangan*. IKIP Ujungpandang.
- Sudjana, HD. 1991. *Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan sejarah Perkembangan Falsafah dan Teori & Pendukung Azas*. Bandung: Nusantra Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Citra Umbara.